

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan atau ketidaksetaraan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Terjadinya ketimpangan diberbagai wilayah dapat menyumbang dorongan kepada wilayah yang terbelakang untuk berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak tertinggal jauh dengan daerah sekitarnya. Selain itu juga daerah-daerah tersebut akan bersaing dalam memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas hidup, sehingga persaingan tersebut dalam hal ketimpangan yang memberikan dampak yang positif. Akan tetapi terdapat dampak negatif yang terjadi jika ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. Dampak negative tersebut dapat berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, dan ketimpangan yang tinggi yang terjadi antar wilayah pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2011).

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan terjadi pada seluruh masyarakat wilayah tertentu yang memiliki standar hidup dengan pendapatan yang berbeda, kesenjangan antar wilayah dapat terjadi karena terdapat perbedaan dukungan kepemilikan faktor-faktor produksi (*endowment factor*). Perbedaan ini dapat menyebabkan tingkat pembangunan di setiap wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga

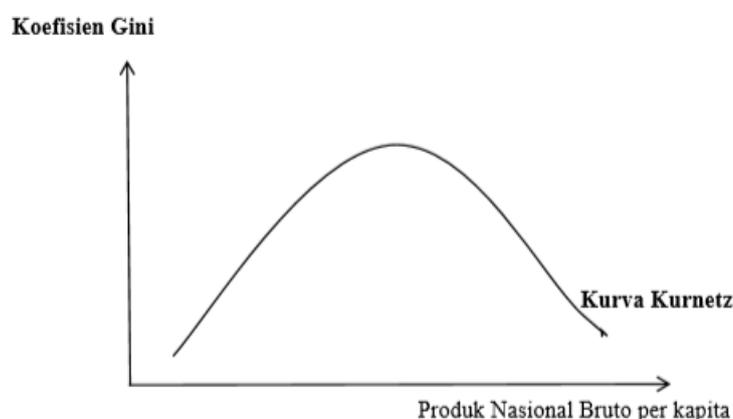
menimbulkan ketimpangan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang berpenghasilan tinggi(Sukirno, 2010).

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang. Terdapat perbedaan dalam proporsi tingkat ketimpangan yang terjadi, dan tingkat kesulitan untuk mengatasi ketimpangan yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Ketimpangan disini dilihat dari pembagian pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menggunakan indikator Indeks Williamson.

Menurut Syafrizal (2008) menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi antar wilayah merupakan aspek umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi setiap daerah. Ketimpangan antar wilayah ini disebabkan oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam dan kondisi demografi pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya wilayah maju dan terbelakang, dan perbedaan kemampuan setiap wilayah dalam mendorong proses pembangunan. Menurut hipotesa Neoklasik, dalam proses pembangunan diawali dengan meningkatnya ketimpangan, proses ini terjadi hingga mencapai titik puncak ketimpangan. Setelah mencapai pada titik puncak maka ketimpangan secara perlahan-lahan akan menurun.

Simon Kuznets (Todaro dan Smith, 2011) menjelaskan bahwa awal tahapan pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi akan membaik. Penelitian ini yang dikenal sebagai kurva Kuznetz (*Kuznets curve*) “U-

Terbalik”, karena terdapat perubahan longitudinal atau deret waktu (*time series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznets dihasilkan dari proses pertumbuhan berkesinambungan dalam memperluas sektor modern ketika suatu negara bergerak dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.



Sumber : Todaro dan Smith, 2011

Gambar 2.1
Kurva Kuznets "U-Terbalik"

Menurut Kuncoro (2006) Kuznets menjelaskan di negara terbelakang pertumbuhan ekonomi berjalan bersama dengan tingginya ketidakmerataan distribusi. Akan tetapi jika negara tersebut sudah mulai maju maka tingkat ketimpangan dan kemiskinan akan semakin menurun. Kuznets juga menjelaskan bahwa awal pembangunan ketimpangan distribusi pendapatan akan tinggi, namun pada tahap selanjutnya ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin menurun atau mengecil. Dengan penjelasan bahwa tahap awal pembangunan ekonomi terjadi penurunan dari pemerataan distribusi pendapatan, selanjutnya semakin tingginya pemerataan pada tahap pembangunan. Pada kurva Kuznets diatas

menjelaskan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai korelasi positif, sedangkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai korelasi negatif.

Menurut Todaro dan Smith (2004), adilnya pemerataan dinegara berkembang merupakan suatu keadaan atau syarat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar wilayah tergantung pada besar kecilnya jumlah pendapatan yang diterima baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu di daerah tersebut. Dalam keadaan seperti ini dijelaskan oleh Todaro (1995) bahwa dinegara maju secara keseluruhan pembagian pendapatan lebih merata dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang.

Menurut Syafrizal (2012) ketimpangan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam.

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada suatu daerah. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam yang melimpah maka dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relative rendah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perbedaan PDRB per kapita yang berbeda

antar wilayah. Wilayah dengan kandungan sumberdaya alam yang melimpah maka nilai PDRB perkapita akan tinggi begitupun sebaliknya.

b. Perbedaan Kondisi Demografis.

Kondisi Demografis meliputi perbedaan pendidikan, kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, dan tingkah laku kebiasaan serta etos kerja masyarakat. Kondisi demografis antar wilayah yang berbeda dapat mendorong terjadinya ketimpangan, hal ini berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja masyarakat daerah tersebut. Daerah dengan kondisi demografis baik maka akan mengakibatkan tingginya produktivitas kerja sehingga akan mendorong peningkatan investasi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penyediaan lapangan kerja dan PDRB perkapita daerah tersebut.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa.

Kegiatan mobilitas barang dan jasa dapat meliputi kegiatan antar daerah dan migrasi. Jika mobilitas barang kurang lancar maka kelebihan produksi tidak bisa dijual ke daerah lain yang membutuhkannya. Hal ini juga terjadi pada migrasi, jika migrasi kurang lancar akan berdampak pada kelebihan tenaga kerja di suatu daerah dan tidak dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat menyebabkan ketimpangan karena kelebihan pada satu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkannya. Sehingga daerah terbelakang sulit dalam mendorong kegiatan perekonomian. Negara berkembang cenderung angka ketimpangan yang tinggi, karena

kurang mobilitas barang dan jasa akibat fasilitas transportasi dan komunikasi yang masih terbatas.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah.

Penyebab terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yaitu: perbedaan sumberdaya alam, fasilitas transportasi, dan kondisi demografis. Daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi maka akan cenderung pertumbuhan ekonomi yang cenderung cepat. Sehingga mendorong proses pembangunan melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah.

Daerah yang mendapatkan alokasi lebih besar dari pemerintah akan menarik banyak investor swasta ke daerah tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Kondisi ini juga menjadi penyebab tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan per kapita yang tinggi.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Oleh karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai pengaruh terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi ketimpangan antar wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat berkurang, sebaliknya semakin rendah ketimpangan antar wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan antar daerah dapat menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) dengan rumus yang dikembangkan oleh Williamson atau disebut indeks ketimpangan Williamson (Hudiyanto, 2017).

$$IW = \sum \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

- Y_i = PDRB perkapita daerah i
- Y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = Jumlah penduduk daerah i
- n = Jumlah penduduk seluruh daerah

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Hudiyanto (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator pembangunan yang diprakarsai oleh UNDP, yang menyatakan bahwa kehidupan yang lebih baik harus diukur bukan saja secara ekonomi namun juga mempertimbangkan tiga variabel berikut:

- a. Panjangnya umur manusia (*longevity*), sebagai cerminan dari kecukupan nutrisi dalam masyarakat.
- b. Pendidikan.
- c. Standar hidup (GDP perkapita).

Indikator lain yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah dilihat dari indikator kualitas hidup. Kualitas hidup sendiri bisa dilihat kualitas secara keseluruhan, bisa juga kualitas hidup

dalam aspek tertentu seperti kesehatan, lingkungan hidup, dan Pendidikan manusianya (Hudiyanto, 2017).

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) (1990) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses perluasan pilihan atau *a process of enlarging the choice of people* bagi masyarakat untuk membangun hidup yang lebih berharga. Terdapat beberapa hal mendasar didalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak.

Menurut Todaro dan Smith (2004) dalam Indeks Pembangunan Manusia mencoba untuk mengurutkan semua negara atau daerah mulai dari skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir IPM:

- a. Masa hidup yang diukur menggunakan usia harapan hidup
- b. Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara terimbang (dua pertiga) dan rata-rata sekolah (satu pertiga)
- c. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

Adapun metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan ketiga komponen tersebut merupakan rata-rata sederhana, yakni sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3}(\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

$$X_2 = \frac{1}{3}X_{12} + \frac{2}{3}X_{22}$$

Keterangan:

X_1 = Lamanya hidup (tahun)

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Pendapatan riil per kapita (Rp)

X_{12} = Rata-rata lama bersekolah (tahun)

X_{22} = Angka melek huruf (persen)

Salah satu manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu bahwa sebuah negara dengan tingkat pendapatan yang rendah berperilaku jauh lebih baik, dan bahwa naiknya pendapatan yang tinggi dapat mempengaruhi pembangunan manusia yang relatif lebih kecil (Todaro dan Smith, 2004).

IPM menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam distribusi pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan lainnya, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. Mengingat dalam IPM bahwa pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan manusia dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan Pendidikan bukan hanya input

fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental (Todaro dan Smith, 2004).

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Mulyadi (2017) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan gambaran jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok tersebut. Tingkat partisipasi tersebut dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat dinyatakan untuk satu kelompok penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10-14 tahun di desa (Simanjatak, 2001). Untuk mengukur besarnya TPAK dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin besar TPAK merupakan dampak dari peningkatan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk yang bukan kategori bukan angkatan kerja maka akan semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan presentase TPAK mengecil.

Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja akan semakin banyak. Tingginya TPAK dapat diartikan bahwa partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Jika angkatan kerja diiringi dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, maka peningkatan TPAK juga diiringi penurunan partisipasi penduduk yang

bekerja. Hal ini berarti bahwa penyebab tingginya TPAK adalah meningkatnya jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Dengan kata lain pengangguran akan bertambah (Mulyadi, 2014).

Menurut Payaman (2005) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi TPAK:

1. Jumlah penduduk yang masih sekolah, bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan TPAK juga akan semakin kecil.
2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, bahwa semakin banyak anggota pada setiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka akan semakin kecil TPAK.
3. Umur, penduduk yang masih muda umumnya tidak besar tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena sebagian besar mereka masih berstatus pelajar. Penduduk laki-laki dalam kelompok umur 25-55 tahun dituntut untuk mencari nafkah, sehingga TPAK relative besar. Lebih lagi penduduk yang berusia lebih dari 55 tahun dalam bekerja tentunya kemampuannya sudah menurun, sehingga hal ini mengakibatkan TPAK yang rendah.
4. Tingkat upah, jika upah yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin banyak masyarakat yang ingin masuk ke pasar kerja. Naiknya upah suatu daerah dapat mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, dalam satu pihak dapat meningkatkan pendapatan (*income effect*) sehingga TPAK turun. Namun dilain pihak peningkatan upah akan menjadikan mahal

nilai waktu sehingga pekerja akan mengantikan waktu senggang (*substitution effect*) untuk bekerja.

5. Tingkat Pendidikan, pendidikan dapat mempengaruhi TPAK. Pertama, banyaknya penduduk yang sekolah akan menurunkan TPAK. Kedua, tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka nilai waktu yang semakin mahal sehingga waktu senggang digunakan untuk bekerja. Banyaknya wanita dengan pendidikan yang tinggi memilih bekerja daripada tinggal dirumah, hal ini menyebabkan TPAK mengalami kenaikan.
6. Kegiatan ekonomi, seperti program pembangunan. Semakin banyak kegiatan ekonomi suatu daerah maka akan meningkatkan TPAK.

4. PDRB Per Kapita

Menurut Basuki dan Prawoto (2015) PDRB dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama satu tahun semakin tinggi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di daerah provinsi atau kabupaten maka semakin tinggi juga perolehan PDRBnya dan nantinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB akan memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Besarnya penerimaan pendapatan oleh masyarakat disebabkan oleh capaian PDRB per kapita daerah tersebut. Oleh karena itu, terus meningkatnya pendapatan

riil per kapita masyarakat maka kemakmuran masyarakat juga akan meningkat (Tamrin, 2001).

Menurut BPS manfaat dari perhitungan PDRB dan PDRB per kapita adalah: Pertama, PDRB berdasarkan harga konstan riil digunakan untuk melihat laju pertumbuhan keseluruhan sektor maupun komponen dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kedua, PDRB berdasarkan harga berlaku nominal digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan ekonomi suatu negara. Ketika PDRB semakin besar maka kemampuan sumber daya ekonomi juga semakin besar. Ketiga, PDRB digunakan untuk melihat seberapa besar nilai PDRB dari masing-masing penduduk yaitu melalui perhitungan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku. Keempat, PDRB digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi perkapita penduduk suatu daerah yaitu dengan melalui PDRB perkapita atas dasar harga konstan.

Besaran nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk. Selain itu juga pengaruh potensi dari sumber-sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi PDRB perkapita. Untuk dapat mengetahui PDRB perkapita dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$PDRB \text{ per kapita}_i = \frac{PDRB_1}{\sum Penduduk_i}$$

Keterangan:

$PDRB \text{ per kapita}_i$ = PDRB Kabupaten/Kota i

$PDRB_1$ = PDRB ADHK Kabupaten/Kota i

$\sum Penduduk_i$ = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota i

Perhitungan nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu dengan harga konstan.

Kuznet menjelaskan bahwa pembangunan di suatu wilayah dapat memicu kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Dalam analisisnya, Kuznet menjelaskan bahwa terdapat relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yang menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Kemudian pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita (Lincoln, 2010).

Wie menjelaskan bahwa apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran di negara yang pesat belum teratasi maka pertumbuhan perekonomian dapat menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi (Lincoln, 2010).

5. Jumlah Penduduk

Secara umum penduduk merupakan kumpulan orang-orang yang menempati wilayah tertentu menurut Hudiyanto (2017), penduduk merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan. Penduduk disatu sisi merupakan potensi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain penduduk menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk merupakan faktor potensial dalam pembangunan, karena penduduk merupakan faktor pendorong

pertumbuhan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan masalah salah satunya yaitu tingginya beban ketergantungan.

Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan masalah seperti struktur umur muda, tingginya jumlah pengangguran, urbanisasi dan lain sebagainya. Masalah kependudukan mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang tidak seimbang dan tidak merata baik dilihat dari antar pulau, antar daerah atau bahkan antar daerah perdesaan dan perkotaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksani (2017) yang berjudul “Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2011-2015. Dengan variabel dependen ketimpangan pendapatan dan empat variabel independen yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan jumlah penduduk. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan analisis regresi data panel *Random Effect Model (REM)*. Hasil dari penelitian diketahui bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 dengan signifikansi 0,05%, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan

terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham dan Evita Hanie Pangaribowo (2016) yang berjudul “Analisis Ketimpangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015” yang bertujuan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi di Indonesia dan mengetahui pengaruh variabel independen. Variabel independent yaitu ketimpangan ekonomi, variabel independen Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor manufaktur, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 3 variabel yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi yaitu IPM, TPT, dan Kontribusi sektor manufaktur dan 3 variabel yang tidak signifikan adalah Kontribusi sektor pertanian, PMDN, dan PMA.

Penelitian yang dilakukan oleh Ermatry Hariani (2019) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015” yang bertujuan untuk meneliti apakah IPM, TPT, UMK berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2012-2015. Variabel dependen ketimpangan pendapatan, variabel independen IPM, TPT, dan UMK. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan model *Random Effect Model* (REM). Hasil uji dalam penelitian ini adalah

variabel IPM berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara dua variabel lainnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur selama periode penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK, dan Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014” data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel dengan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Variabel dependen dalam penelitian ini ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel independennya pertumbuhan ekonomi, IPM, TPAK, dan pengangguran terbuka. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran terbuka berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel TPAK berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan Yenni Del Rosa dan Ingra Sovita (2016) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa” yang bertujuan untuk menganalisis PDRB perkapita, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2009-2015 dengan tingkat signifikansi 0,05. Variabel dependen ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan variabel independen PDRB perkapita, populasi penduduk, TPT, dan derajat desentralisasi fiskal.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel PDRB per kapita, populasi penduduk, TPT memiliki pengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan probabilitas dibawah taraf signifikansi 5%, sedangkan satu variabel derajat desentralisasi fiskal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena probabilitas diatas tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,1258.

Penelitian yang dilakukan Amalia Cristescu, Larisa Stanila, dan Maria Denisa Vasilescu (2014) dengan judul "*The Analysis of Regional Earnings Inequalities in Romania*" yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan daerah Romania dan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel. Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel independen yaitu PDB, investasi asing, tingkat pendidikan, populasi penduduk, dan inflasi. Dari keempat variabel independen: PDB, investasi asing, tingkat Pendidikan, dan inflasi mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan tingkat signifikansi 5%. Dari ketiga variabel independent investasi asing, tingkat Pendidikan, dan inflasi memiliki pengaruh yang positif, sedangkan PDB berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Uma Rani dan Marianne Furrer (2016) yang berjudul "*Decomposing Income Inequality Into Factor Income Components: Evidence From Selected G20 Countries*" yang bertujuan untuk menganalisis kontribusi perbedaan faktor-faktor ketimpangan pendapatan dan

ketimpangan pendapatan tenaga kerja di 13 G20 negara yang dipilih untuk mengatasi masalah di tingkat kebijakan. Data yang digunakan yaitu mikro data dari survey di 13 negara G20. Variabel dependen ketimpangan pendapatan. Variabel independen yaitu pendapatan upah tenaga kerja, status pekerjaan, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan kelompok industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi dekomposisi. Hasil dari penelitian ini bahwa tenaga kerja merupakan faktor yang paling kuat berkontribusi terhadap ketimpangan disemua negara. Dalam ketimpangan pendapatan tenaga kerja bahwa status pekerjaan, pendidikan merupakan faktor yang penting berkontribusi terhadap ketidaksetaraan di sebagian negara. Usia, jenis kelamin dan kelompok industri juga berkontribusi ketidaksetaraan di beberapa negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Ilker (2018) dengan judul “*The Effect of Government Social Spending on Income Inequality in OECD: A Panel Data Analysis*”. Variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel independen yaitu pengeluaran sosial pemerintah dalam PDB, keterbukaan, pengeluaran pendidikan dalam PDB, tingkat pendaftaran sekolah, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan populasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pengeluaran sosial pemerintah dalam PDB, tingkat pendaftaran sekolah, tingkat pengangguran, dan tingkat pertumbuhan populasi mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di OECD, sedangkan variabel keterbukaan,

pengeluaran pendidikan dalam PDB, jumlah penduduk, tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di OECD.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Bratoeva dan Manoleva (2017) dengan judul "*Macroeconomic Determinants of Income Inequality in Bulgaria*" yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan makroekonomi ketimpangan pendapatan di Bulgaria tahun 1990-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel independennya adalah PDB perkapita, perubahan struktur ekonomi, investasi asing langsung, inflasi, pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial dalam PDB, dan tingkat pendidikan. Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan menggunakan program STATA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi, investasi asing langsung, dan tingkat pendidikan secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Sedangkan PDB perkapita, perubahan struktur ekonomi, dan pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial secara statistik signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Niyimbanira (2017) dengan judul "*Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province*" yang bertujuan untuk memperkirakan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Afrika Selatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sedangkan

variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan menggunakan regresi data panel model *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Pool Regression Models*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena hasil probabilitasnya $> 0,05$. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Amerika Selatan, namun tidak dengan ketimpangan pendapatan. Dalam satu sisi terdapat hubungan negative antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sekitar 64% perubahan ketimpangan pendapatan dan sekitar 63% perubahan kemiskinan adalah sebagian hasil dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Mpumalanga.

C. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan literature, penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesa yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

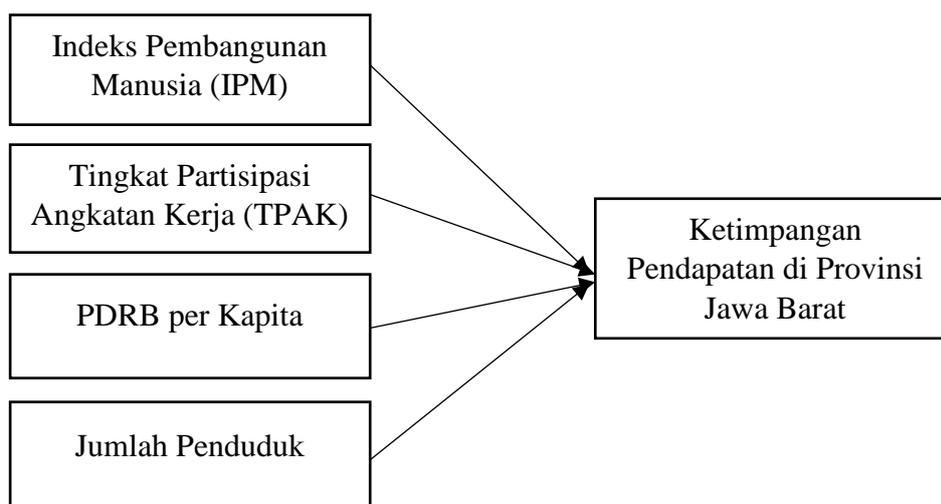
1. Diduga terdapat pengaruh negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, bahwa semakin tinggi IPM maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga terdapat pengaruh negatif antara TPAK dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, bahwa semakin meningkatnya Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

3. Diduga terdapat pengaruh negatif antara PDRB perkapita dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, bahwa semakin tinggi PDRB perkapita maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
4. Diduga terdapat pengaruh positif antara Jumlah Penduduk dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka akan berpengaruh pada peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka suatu kerangka pemikiran yang skematis digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis